

# Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Kampar

Ilham Yuri Nanda <sup>1</sup>; MHD Rafi Yahya <sup>2\*</sup>; Fitriyah <sup>3</sup>; Teguh Yuwono <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; [ilhamnanda99@gmail.com](mailto:ilhamnanda99@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Psikolog dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab, Pekanbaru, Indonesia; [mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id](mailto:mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id)

<sup>3,4</sup> Departemen Pemerintahan dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

\*Correspondence : [mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id](mailto:mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat menyikapi kasus Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang mengkonsepkan kebijakan *physical distancing* atau pembatasan sosial berskala besar baik dipusat maupun daerah. Masalah difokuskan pada bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar dalam menangani kasus Covid-19. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Jeff dan Shah dari teori ini akan dapat dilihat bagaimana perspektif masyarakat atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, dan data-data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner atau angket dan diperkuat oleh wawancara dari stakeholder serta dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menunjukkan bahwa masyarakat reaksi Kabupaten Kampar kurang setuju dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ketidaksetujuan masyarakat Kabupaten Kampar didominasi pada rentan usia 30 tahun ke bawah yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesehatan yang didasari dengan rasa egois serta temuan ini melihat reaksi publik yang menuai kritikan yang perlu dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar karena masih dianggap menjadi batasan bagi masyarakat yang menghambat perekonomian, pendidikan.

## ABSTRACT

This article aims to see how public participation responds to the Covid-19 case that has hit the world, including Indonesia, which has conceptualized a policy of physical distancing or large-scale social restrictions both at the central and regional levels. The problem is focused on how the community participates in the Large-Scale Social Restrictions policy implemented by the Kampar Regency government in handling the Covid-19 case. In order to approach this problem, the theoretical references of Jeff and Shah are used. From this theory, it will be seen how the public's perspective on the policies implemented by the government. The method used is quantitative, and the data is collected by distributing questionnaires and reinforced by interviews with stakeholders and analyzed qualitatively. This study shows that the reactionary community of Kampar Regency does not agree with the existence of the Large-Scale Social Restrictions policy. The disapproval of the people of Kampar Regency is dominated by the vulnerable aged 30 and under who show a lack of concern for health which is based on selfishness and this finding sees a public reaction that has drawn criticism that needs to be evaluated by the Regional Government of Kampar Regency because it is still considered a limitation for the community which hinders the economy, education.

## Kata kunci

*Analisis Pengaruh, Covid-19, Kebijakan Publik, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Partisipasi Masyarakat*

## Keywords

*Influence Analysis, Covid-19, Public Policy, Large-Scale Social Restrictions, Community Participation*

## Pendahuluan

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan merebaknya penyakit Penumonia yang tidak wajar. Diketahui awal mulai virus ini berasal dari Wuhan ibu Kota Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini merupakan penyakit menular yang menular melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika terinfeksi batuk atau bersin (WHO 2020). Sebagian besar kasus COVID-19 memiliki tanda dari gejala flu, seperti demam, batuk, pilek, dan pusing dalam kondisi berat sehingga mengalami sesak napas yang berat yang merupakan gejala umum pada penyakit biasa sehingga susah untuk dikenali secara spesifik (Wu et al. 2020)

Penyebaran virus ini yang sangat pesat di belahan dunia dan begitu juga Indonesia. Indonesia yang pada awalnya merasa mampu membentengi diri dari serangan pandemi ini ternyata tidak mampu membentengi diri dari serangan pandemi. Dibuktikan pada tanggal 14 Februari 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus pasien positif COVID-19 pertama. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan memberikan fokus yang lebih besar dengan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk bersiap menerima serangan pandemi ini, salah satunya adalah penyediaan Rumah Sakit selama 24 jam yang bersiap dan siaga untuk melayani pengaduan dan pemeriksaan terhadap orang-orang yang bergejala (Mas'udi and Winanti 2020).

Laju penyebaran pandemi akhirnya telah menyebar ke seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan hingga ke pelosok desa. Dengan meningkatnya angka kasus yang bertambah setiap harinya menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan masyarakat. Melihat tingginya tingkat persebaran yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera menetapkan langkah strategis untuk pengawasan kesehatan (Harapan et al. 2020). Pemerintah juga harus mampu memberikan solusi yang tepat untuk penanganan kesehatan (Wajdi et al. 2020). Salah satu upaya yang diambil untuk mengatasi penyebaran virus ini adalah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini dilakukan untuk memutus dan mengendalikan penyebaran virus yang dapat mengancam sistem kesehatan negara.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Maka kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang resmi diambil oleh pemerintah yang dapat diterapkan di daerah-daerah Indonesia berdasarkan kepada izin dari Menteri Kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Pada dasarnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan untuk mengurangi interaksi sosial fisik antara individu guna meminimalkan resiko penularan virus. Beberapa langkah yang diterapkan dalam kebijakan ini antara lain pembatasan perjalanan, penghentian kegiatan pendidikan, penutupan tempat umum seperti pusat perbelanjaan, tempat hiburan, restoran, dan lain sebagainya.

Sebenarnya salah satu bentuk pembatasan sosial yang paling efektif adalah penerapan *lockdown* atau karantina wilayah. Pada saat *lockdown*, masyarakat diharapkan untuk tinggal di rumah dan hanya melakukan perjalanan yang penting, seperti untuk mencari makanan atau keperluan medis yang mendesak. Selain itu, kebijakan ini juga dapat melibatkan pengaturan jam operasional untuk sektor-sektor esensial seperti pasar, rumah sakit, dan apotik. Namun dikarenakan resiko yang didapat dari kebijakan *lockdown* dan belum matangnya pemahaman masyarakat tentang *lockdown* tersebut kebijakan ini urung diambil oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah lebih memilih untuk menerapkan kebijakan rekayasa sosial yang sesuai dengan perhitungan mereka dan dinilai cocok bagi masyarakat Indonesia

Dalam sejumlah laporan majalah Forbes yang berjudul "*Deep Analysis of Global Pandemic Data Reveals Important Insight*" yang menganalisis dalam bentuk peringkat penangan COVID-19 di seluruh dunia telah menempatkan Indonesia pada kategori resiko tinggi dan berada pada peringkat ke 18 dari 20 negara yang berada pada kategori yang sama (Colangelo 2020). Laporan tersebut sedikit banyaknya menggambarkan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah masih cukup rendah.

Berdasarkan dengan hal itu, adanya peraturan yang ditetapkan oleh daerah, pemerintah Kabupaten Kampar memutuskan sebuah kebijakan PSBB yang diikuti dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 360-416/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (2019). Dengan diberlakukannya kebijakan PSBB, pemerintah mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program kebijakan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk tindakan yang akan dilakukan oleh suatu individu untuk mengikuti kegiatan apapun maupun peraturan yang ada dan telah ditetapkan. Berkaitan dengan kebijakan publik, partisipasi perlu diperlakukan karena menjadi salah satu faktor agar kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berhasil sesuai dengan tujuannya. Menurut Hosnan dalam Romi Aqmal menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu jargon yang telah mengemuka saat ini pemerintah yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu proses pemerintah yang dijalan atas dasar partisipasi masyarakat telah memiliki salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik (Aqmal 2020). Kebijakan atau regulasi yang ada tidak akan efektif apabila tidak didukung dengan upaya yang lebih tegas dan partisipasi masyarakat, dan seluruh pihak terkait menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyebaran COVID-19 ini (Karyono, Rohadin, and Indriyani 2020).

Menurut Jeff dah Shah *good governance* juga digunakan untuk melihat partisipasi melalui tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas

masuk (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan. Menurut Theron dan Mchunu dalam Muhammad Mulyadi partisipasi masyarakat mengacu pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dan menarik manfaat dari kegiatan yang diikuti (Mulyadi 2020). Menurut Isbandi partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi 2007).

Menurut Conyers dalam Fathurrahman menyebutkan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting (Fadil 2013) yaitu: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3) Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turun "urun rembug" (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Sosial Berskala Besar akan membuat masyarakat Kabupaten Kampar tidak senang karena terbatasnya akses dan mobilitas atau ruang gerak, meskipun di lain sisi masyarakat juga tidak senang dan khawatir dengan lajunya pergerakan virus yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Keresahan masyarakat akan kebijakan PSBB dilatarbelakangi oleh adanya keharusan untuk merubah kebiasaan mereka yang kini telah dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan PSBB ini membuat ruang gerak masyarakat terbatas yang menyebabkan kegiatan tidak dapat terlaksana, pedagang-pedagang yang tidak bisa berjualan, liburan tempat sekolah, yang menyulitkan masyarakat mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan ekonomi dikarenakan pendapatan tertinggi masyarakat Kabupaten Kampar didominasi oleh Pedagang dan juga Petani. Oleh sebab itu juga yang menjadi pemicu masyarakat tidak mematuhi protokol yang diatur di dalam kebijakan PSBB, seperti tidak menggunakan masker, tempat-tempat umum yang masih buka di luar jam yang telah ditentukan sehingga tidak terjadinya *physical distancing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar menjadi persoalan kurang efektifnya penanganan pandemi ini karena langkah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dimana belum terdapat kewenangan yang cukup jelas dalam penanganan COVID-19 sehingga kemudian menyebabkan banyak kepala daerah yang cenderung

mengambil kebijakan yang bervariasi dan berbeda satu sama lain (Andiraharja 2020). Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Imas Novita Juaningsih dkk, menegaskan bahwa jaminan terhadap kesejahteraan keamanan masyarakat telah dilakukan pemerintah melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa penanganan COVID-19 dikatakan tidak efektif karena masyarakat yang belum sepenuhnya memahami urgensi dari kondisi kesehatan, sosialisasi sehingga menimbulkan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap COVID-19 (Juaningsih et al. 2020)

Pada dasarnya kebijakan non-populer ini diterapkan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan pemerintah terhadap COVID-19. Namun, hadirnya kebijakan PSBB memaksa masyarakat memiliki efek samping dari upaya untuk merubah kebiasaan mereka di berbagai aspek. Masyarakat dituntut banyak hal baru sebagai penyesuaian-penyesuaian ataupun membentuk kebiasaan baru. Efek samping yang menyebabkan dinamika dari kebijakan inilah yang menjadi alasan ketertarikan dalam penelitian ini untuk mengangkat tulisan tentang Analisis Pengaruh Kebijakan PSBB terhadap Masyarakat di Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat dalam implementasi kebijakan PSBB di Kabupaten Kampar, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam menaati aturan yang diterapkan dalam kebijakan PSBB, serta untuk melihat bagaimana *physical distancing* yang diaplikasi melalui kebijakan PSBB oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini berkontribusi bagi kajian dan keilmuan bagi pemerintah untuk dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi yang baik dalam sebuah kebijakan tentu dilakukan dengan sukarela karena merasa masing-masing mempunyai tanggung jawab yang dan kepentingan yang sama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dan perlu memerlukan partisipasi dari semua komponen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat mencapai tujuan kebijakan bersama.

## Metode

Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian berupa angka dan analisis-analisis menggunakan statistik (Sugiyono 2018). Dan penelitian yang menitik beratkan pada penyajian data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan yang menggunakan statistik dengan kata lain dalam penelitian kuantitatif peneliti berangkat dari sebuah teori menuju data dalam bentuk angka dan berakhir pada penerimaan atau penolakan dari teori yang telah diuji kebenarannya (Tanzeh 2006). Dalam penelitian ini menggunakan Kuantitatif karena peneliti ingin melihat reaksi masyarakat dalam kebijakan PSBB dan metode ini dianggap sebagai metode yang cocok digunakan untuk menjawab penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat

Kabupaten Kampar dengan menggunakan rumus Slovin. Sampel penelitian ini dengan penarikan *random* sampling yang pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut (Sugiyono 2018). Dalam penelitian ini juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada *stakeholder* dengan tujuan memperkuat dan validasi terhadap respon masyarakat Kabupaten Kampar.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat diukur dari tingkat keberhasilannya yang bersifat realistis dengan kultur yang ada ditingkat pelaksanaan kebijakan. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap kebijakan PSBB untuk melihat bagaimana masyarakat Kabupaten Kampar menerima kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kepercayaan (*trust*) adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan (Priansa 2017)

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah

No	Item Penilaian	Skala Penilaian		
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	Percaya akan tujuan kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19	57%	37%	6%
2	PSBB merupakan cara yang tepat untuk menekan penyebaran COVID-19	57%	37%	6%
3	Pemerintah menjalankan kebijakan PSBB sesuai yang ditetapkan	28%	62%	10%
4	Pemerintah menyediakan sarana prasarana selama kebijakan PSBB	27%	56%	17%
	<b>Total</b>	42%	48%	10%

Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti, (2021)

Dari kuesioner yang telah disebarkan 42% Masyarakat Kabupaten Kampar mempercayai bahwa kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran dan untuk menekan penyebaran COVID-19. Masyarakat mempercayai bahwa kebijakan yang ditetapkan telah sesuai aturan yang ditetapkan dan telah menyediakan sarana dan prasarana seperti adanya penyediaan fasilitas kesehatan, tempat isolasi, serta adanya penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat. Dan berdasarkan kuesioner tersebut 48% masyarakat kurang setuju akan kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran COVID-19, dengan beberapa alasan yaitu kebijakan PSBB yang diterapkan masih dirasa kurang efektif dan tidak berjalan dengan lancar karena masih terindikasi masyarakat yang berkumpul di kerumunan, tempat-tempat umum yang masih ramai didatangi. Dan berdasarkan kuesioner yang disebarkan 10%

masyarakat sama sekali tidak setuju terhadap kebijakan PSBB dengan alasan sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah tidak merata bahkan ada yang tidak mendapatkan fasilitas selama kebijakan PSBB diberlakukan.

## 2. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi untuk mengetahui seberapa mengetahui masyarakat yang berpartisipasi dalam sebuah kebijakan. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kebijakan PSBB di Kabupaten Kampar dengan menyadari pentingnya kebijakan yang telah ditetapkan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi 2007).

**Tabel 2.** Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian		
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	Mengetahui isi kebijakan PSBB	40%	46%	14%
2	Mengetahui dan memahami aturan PSBB	40%	50%	10%
3	Mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan PSBB	24%	45%	31%
4	Mengajak teman-teman selingkungan untuk mematuhi protokol kesehatan selama PSBB	39%	50%	11%
5	Mengingatkan teman-teman yang lain akan aturan PSBB yang ditetapkan	37%	43%	20%
	Total	36%	47%	17%

Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti (2021)

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi 2007).

Reaksi publik terhadap kebijakan PSBB ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Kampar. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan 36% presentasi berpendapat setuju dengan kebijakan PSBB serta ikut berpartisipasi dalam penerapan kebijakan PSBB seperti mematuhi protokol kesehatan, mengajak masyarakat lain untuk mematuhi protokol kesehatan, dan 47% masyarakat kurang setuju atau kurang berpartisipasi dalam kebijakan PSBB dengan alasan banyaknya masyarakat yang belum memahami konsep dari kebijakan PSBB serta tidak mematuhi aturan protokol kesehatan. Kemudian, 17% masyarakat tidak setuju

terhadap kebijakan PSBB dengan alasan masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan yang akan ditetapkan.

Dalam hal ini, hasil mengenai reaksi publik masyarakat juga dikuatkan oleh statemen dari *stakeholder* Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa “sosialisasi yang dilakukan pemerintah telah dilaksanakan dan juga diinformasikan dalam beberapa media sosial dan media cetak yang telah dilaksanakan hampir menyeluruh di desa atau kecamatan di Kabupaten Kampar. Namun hal ini difokuskan pada daerah-daerah yang besar atau dominan saja. Dan sebagian masyarakat dengan total 60% hanya mematuhi aturan jika adanya petugas satgas Covid yang menegur, dan dalam persentase 60% tersebut berada pada rentang umur 30 tahun kebawah atau dalam usia remaja hingga dewasa, untuk usia 30 tahun keatas sudah bisa dikatakan tertib dalam menjalankan protokol kesehatan”.

### 3. Tingkat kuantitas dan kualitas (kritik dan saran) untuk pembangunan

Tingkat kuantitas dan kualitas dalam penerapan kebijakan PSBB ini berupa kritik dan saran untk mengetahui kualitas dari suatu kebijakan yang diperoleh dari pendapat dan reaksi masyarakat Kabupaten Kampar

**Tabel 3.** Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Kuantitas dan Kualitas Masukan (Kritik dan Saran) Untuk Pembangunan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian		
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	Tidak berpergian ketempat keramaian atau umum selama kebijakan PSBB	36%	54%	10%
2	Melaksanakan kebijakan Work From Home (WFH)	27%	26%	47%
3	Mengikuti Pendidikan Jarak Jauh	42%	12%	46%
4	Penerima program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah selama PSBB	30%	0%	70%
5	Bantuan langsung tunai dapat mencukupi sisi ekonomi selama PSBB	8%	22%	70%
	Total	28%	23%	49%

Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti (2021)

Dalam penelitian ini ditemui hasil berupa kritik dan saran oleh masyarakat Kabupaten Kampar terhadap kuantitas dan kualitas kebijakan PSBB yang diterapkan. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan didapatkan 28% masyarakat setuju untuk menaati segala aturan kebijakan yang telah ditetapkan dan mengikuti segala bentuk arahan seperti arahan untuk tidak bepergian ke tempat ramai atau umum. Dan 23% masyarakat kurang setuju dengan alasan bahwa masih adanya masyarakat yang merasa kebijakan PSBB menghambat pekerjaan mereka yang rata-rata berada pada perkumpulan orang-orang ramai, dan bantuan yang diberikan berupa Bantuan

Langsung Tunai (BLT) tidak mencukupi kebutuhan ekonomi mereka jika menaati protokol kesehatan. Selanjutnya 49% masyarakat tidak setuju dengan kebijakan PSBB karena merasa bantuan yang diberikan pemerintah tidak merata dan tidak sesuai kriteria pemberian.

Dalam hal ini mengenai kritik dan saran oleh masyarakat Kabupaten Kampar terhadap kualitas dan kuantitas yang diperkuat oleh *stakeholder* Kabupaten Kampar Kebijakan PSBB ini sangat sulit mengatur pada usia 19 tahun atau menginjak usia remaja dikarenakan sifat remaja yang masih ingin bebas dan berkumpul-kumpul. Dan pemberian BLT dirasakan juga kurang tepat sasaran karena pihak dari pemerintahan yang mengatakan bahwa pemberian ini telah sesuai dengan kriteria yang telah diberikan RT/RW, namun hal itu tidak ditemukan jika sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bagi siapa yang pantas untuk mendapatkan dan tidak pantas untuk mendapatkan. Serta dalam bidang pendidikan pun juga dirasa sangat tidak efektif karena tidak adanya kontrol dari orang tua terhadap pendidikan anak yang terbagi antara mencari kebutuhan rumah tangga dan urusan keluarga.

Berdasarkan hasil kritik dan saran kualitas dan kuantitas adalah selama adanya pandemic dan diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini banyak dampak yang terjadi untuk masyarakat. Dampak yang spesifik terjadi pada bidang ekonomi karena adanya kebijakan tersebut banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja di luar rumah, kurangnya pendapatan masyarakat yang menyebabkan masyarakat kabupaten Kampar tidak bisa menghidupi kehidupannya. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Akan tetapi bantuan tersebut masih banyak mendapatkan kendala karena bantuan yang diberikan bisa dikatakan banyak yang tidak tepat sasaran. Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Melihat dan mendengar dari masyarakat yang merasa sedih karena dirinya pribadi yang tidak mendapatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah

#### **4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan**

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlangsung lama secara tidak langsung pemerintah mengharuskan membuat kebiasaan masyarakat yang mudah untuk beradaptasi. Oleh sebab itu hasil dari sub ini menunjukkan bagaimana perubahan sikap masyarakat selama kebijakan PSBB diterapkan.

Pada instrumen ini melihat terjadinya perubahan sikap masyarakat sebelum dan setelah adanya kebijakan PSBB yang menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah kebijakan yang telah ditetapkan. Perubahan Sosial atau perubahan masyarakat mengacu pada adanya perubahan-perubahan dalam berbagai pola tindakan dan acuan bagi pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat (Suparlan 2008).

Berdasarkan tabel 4 sebanyak 44% masyarakat setuju bahwa kebijakan PSBB dapat merubah pola kehidupan dengan alasan masyarakat lebih memprioritaskan

kesehatannya dengan mematuhi segala bentuk arah pemerintahan dengan selalu menggunakan masker, *hand sanitizer*, *physical distancing* atau apapun kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Kemudian 46% masyarakat kurang setuju dengan memperdulikan kesehatan mereka dengan alasan kebutuhan ekonomi. Karena masyarakat yang masih berpikiran bahwa jika hanya berdiam dirumah dan menjaga *physical distancing* tidak akan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan 10% masyarakat Kabupaten Kampar tidak setuju bahkan tidak memperdulikan kebijakan PSBB yang berlangsung terus menerus yang membuat masyarakat menjadi bosan dan mengabaikan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan termasuk protokol kesehatan.

**Tabel 4.** Distribusi Responden Berdasarkan Terjadinya Perubahan Sikap Masyarakat Menjadi Lebih Peduli Terhadap Setiap Langkah Pembangunan

No	Item Penilaian	Skala Penilaian		
		Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1	Pandemic membuat jauh lebih peduli terhadap kesehatan	74%	18%	8%
2	Mengikuti segala bentuk arahan selama pandemic	42%	53%	5%
3	Mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker	46%	49%	5%
4	Menjalankan aturan <i>physical distancing</i>	45%	47%	8%
5	Mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan handsinitizer	37%	48%	15%
6	Bersedia untuk dikarantina apabila terkena COVID-19	51%	43%	6%
7	Akan mematuhi kebijakan PSBB	38%	48%	14%
8	Jenuh dengan kebijakan PSBB yang terlalu lama	39%	55%	6%
9	Tidak tahan dengan kebijakan PSBB dan mengabaikan protokol kesehatan	31%	48%	21%
Total		44%	46%	10%

Sumber: Data Olahan Kuesioner Peneliti (2021)

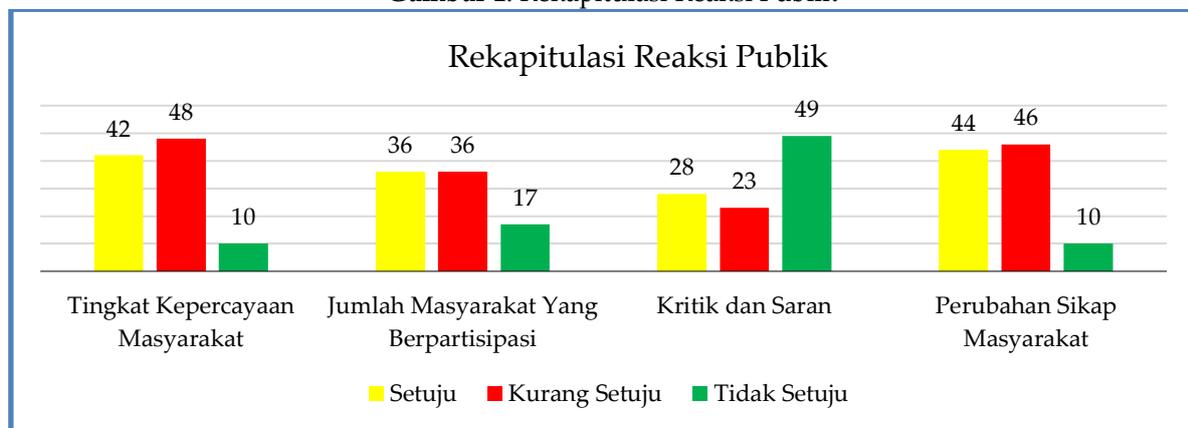
Dalam hal ini, hasil mengenai perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan juga dikuatkan oleh *statement* dari *stakeholder* Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa “untuk tetap menjaga masyarakat pemerintah menghimbau kepada RT/RW atau Kecamatan untuk selalu

mengingatkan masyarakat agar tetap dapat memenuhi protokol kesehatan. Akan tetapi, banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan tetap berada pada rentan usia dibawah 30 tahun. Bahkan bisa dikatakan yang melakukan *protocol* kesehatan itu tidak semua masyarakat bahkan ada beberapa kecamatan yang bisa dikatakan zero atau nihil dalam menerapkan *protocol* kesehatan. Selama pelaksanaan kebijakan PSBB hambatan yang pemerintah dapatkan itu berupa kesadaran dari masyarakat nya sendiri, dan pemerintah sudah melakukan yang maksimal, dan ditinjau dari hasil setelah diterapkan nya PSBB dan segala jenis nya bisa dikatakan efektif akan tetapi catatan itu kembali lagi kepada batas-batas usia yang menerapkannya”

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemui bahwa terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan adalah dengan adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar masyarakat telah mengalami perubahan seperti masyarakat yang sudah mulai terbiasa untuk menggunakan masker, selalu membawa *hand sanitizer* serta masyarakat jauh lebih peduli terhadap kesehatan mereka seperti menjaga pola hidup, berolahraga agar tidak terjadinya fisik yang lemah.

## 5. Rekapitulasi Reaksi Publik Tentang Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar

Gambar 1. Rekapitulasi Reaksi Publik



Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

Berdasarkan rekapitulasi reaksi publik yang objek penelitian yaitu Masyarakat Kabupaten Kampar terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kampar. Berdasarkan data rekapitulasi di atas dan dengan penjelasan tentang Teknik Pengukuran dimana persentase sebesar 34- 66% masuk dalam kategori kurang setuju, dengan jumlah responden 41 orang dengan persentase 41% yang artinya setiap indikator penelitian yang dihasilkan dari tanggapan responden masyarakat Kabupaten Kampar adalah Kurang Setuju.

## Kesimpulan

Partisipasi masyarakat di Kabupaten Kampar sudah cukup terlibat dari kepercayaan kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi, tingkat kuantitas dan kualitas (kritik dan saran), dan adanya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih baik terhadap setiap langkah pembangunan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Partisipasi masyarakat Kabupaten Kampar terhadap kebijakan PSBB sangat membantu dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Namun, penerapan kebijakan PSBB yang terlalu lama membuat keluhan masyarakat yang semakin tinggi yang mengakibatkan ekonomi, pendidikan, dan sosial terganggu serta sarana dan prasarana seperti bantuan yang diberikan belum mencukupi bagi kebutuhan masyarakat dan pembagian yang tidak merata. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor umur pada masyarakat Kabupaten Kampar menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan PSBB tersebut. Dibuktikan oleh *stakeholder* yang menangani kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa ketidakpatuhan masyarakat Kabupaten Kampar didominasi rentan usia 30 tahun kebawah yang berada pada Gen Milenial dan Gen Z yang tidak mempunyai kesadaran dan rasa peduli dengan adanya kebijakan, yang ingin merasa bebas dan tidak memperdulikan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah Kabupaten Kampar perlu meninjau kembali sarana atau prasarana atas kebijakan PSBB yang diberikan.

## Referensi

- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. *Fisip UI Press*.
- Andiraharja, Diyar Ginanjar. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 13(1):52–68. doi: 10.33701/jppdp.v13i1.1005.
- Aqmal, Romi. (2020). Pendidikan Keluarga Dan Partisipasi Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Di Masa Pandemi Covid-19 Desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga. *TANJAK: Journal of Education and Teaching* 1(2):2013–2222. doi: 10.35961/tanjak.v1i2.159.
- Colangelo, Margaretta. (2020). Pandemic Data Reveals Important Insights. April 13, 1–11.
- Fadil, Fathurrahman. (2013).Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* II(8):287–94.
- Harapan, Harapan, Naoya Itoh, Amanda Yufika, Wira Winardi, Synat Keam, Haypheng Te, Dewi Megawati, Zinatul Hayati, Abram L. Wagner, & Mudatsir. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Literature Review. *Journal of Infection and Public Health* 13(5):667–73. doi: 10.1016/j.jiph.2020.03.019.

- Juaningsih, Imas Novita, Yoshua Consuello, Ahmad Tarmidzi, & Dzakwan NurIrfan. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7(6):509–18.
- Karyono, Karyono, Rohadin Rohadin, & Devia Indriyani. (2020). Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2(2):164. doi: 10.24198/jkrk.v2i2.29127.
- Mas'udi, Wawan, & Poppy S. Winanti, eds. (2020). Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia: *Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, Mohammad. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* XII(8):13–18.
- Priansa, Donni Juni. (2017). Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (2008). Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural;(Buku Kumpulan Tulisan Prof. Parsudi Suparlan, Ph. D. In Memorium, Editor: Chrysnanda. DL Dan Yulizar Syafri); 2008. *Jakarta. Penerbit JPKIK*.
- Tanzeh, Ahmad. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkap.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin, Iwan Kuswandi, Umar Al Faruq, Zulhijra, Khairudin, & Khoiriyah. (2020). Education Policy Overcome Coronavirus, A Study of Indonesians. *EDUTECH: Journal of Education And Technology* 3(2):96–106. doi: 10.29062/edu.v3i2.42.
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus Disease*. doi: 10.1016/c2020-0-01739-1.
- Wu, Canrong, Yang Liu, Yueying Yang, Peng Zhang, Wu Zhong, Yali Wang, Qiqi Wang, Yang Xu, Mingxue Li, Xingzhou Li, Mengzhu Zheng, Lixia Chen, & Hua Li. (2020). Analysis of Therapeutic Targets for SARS-CoV-2 and Discovery of Potential Drugs by Computational Methods. *Acta Pharmaceutica Sinica B* 10(5):766–88. doi: 10.1016/j.apsb.2020.02.008.